

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA DAN STRATEGI
PELAKSANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN
DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PUSAT, PROVINSI,
DAN KABUPATEN DI KABUPATEN PASAMAN**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA DAN STRATEGI
PELAKSANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN
DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PUSAT, PROVINSI,
DAN KABUPATEN
DI KABUPATEN PASAMAN**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penyelesaian Studi di Program Studi Magister
Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Andalas*



**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

ABSTRAK

Perbedaan kewenangan pengelolaan irigasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten berpotensi menimbulkan kesenjangan kinerja operasi dan pemeliharaan (O&P). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan O&P pada daerah irigasi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten di Kabupaten Pasaman, mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan, serta merumuskan strategi dan rekomendasi peningkatan kinerja sistem irigasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 8 orang dari unsur pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten) serta 1 orang dari unsur masyarakat yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Narasumber tersebut meliputi instansi pengelola irigasi dan petugas teknis yang terlibat langsung dalam pelaksanaan O&P. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola perbedaan pelaksanaan O&P antar kewenangan, serta dikaitkan dengan nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) tahun 2021 dan kondisi pemenuhan kebutuhan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP). Hasil menunjukkan bahwa daerah irigasi kewenangan pusat dan provinsi memiliki pelaksanaan O&P yang lebih terstruktur dan konsisten dibandingkan kewenangan kabupaten. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh dukungan anggaran berbasis AKNOP, kecukupan sumber daya manusia teknis, sistem monitoring dan evaluasi, serta penguatan kelembagaan. Keterbatasan pendanaan dan belum optimalnya penerapan AKNOP menjadi faktor dominan rendahnya kinerja pada kewenangan kabupaten. Strategi peningkatan diarahkan pada penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis AKNOP, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta optimalisasi partisipasi P3A guna mendukung pengelolaan irigasi berkelanjutan di Kabupaten Pasaman.

Kata Kunci : Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; IKSI; Kewenangan Pengelolaan; AKNOP; Kabupaten Pasaman



ABSTRACT

Differences in irrigation management authority between the central, provincial, and regency governments have the potential to create disparities in the performance of operation and maintenance (O&M). This study aims to compare the implementation of O&M in irrigation areas under central, provincial, and regency authorities in Pasaman Regency, identify supporting and constraining factors, and formulate strategies and recommendations to improve irrigation system performance. This research employs a qualitative approach using in-depth interviews and field observations. The study involved 9 respondents, consisting of 8 representatives from government institutions (central, provincial, and regency levels) and 1 representative from the community, namely the Water User Farmers Association (P3A). The respondents include irrigation management agencies and technical personnel directly involved in O&M implementation. The data were analyzed using thematic analysis to identify patterns of differences in O&M implementation across authorities, and were further associated with the Irrigation System Performance Index (ISPI/IKSI) in 2021 and the fulfillment condition of the Actual Operation and Maintenance Needs (AKNOP). The results indicate that irrigation areas under central and provincial authority demonstrate more structured and consistent O&M implementation compared to those under regency authority. These differences are influenced by the availability of AKNOP-based budgeting, adequacy of technical human resources, monitoring and evaluation systems, and institutional strengthening. Limited funding and the suboptimal implementation of AKNOP are identified as the dominant factors contributing to lower performance at the regency level. Improvement strategies are directed toward strengthening planning and budgeting based on AKNOP, enhancing institutional and human resource capacity, and optimizing the participation of P3A to support sustainable irrigation management in Pasaman Regency.

Keywords : *Irrigation Operation and Maintenance; IKSI; Management Authority; AKNOP; Pasaman Regency*